

Analisis Manajemen Konflik Dalam Peningkatan Kualitas Kerja Pada Lembaga Kementerian Melalui Kegiatan *Retreat* Kabinet Merah Putih

Mohamad Hermy Hibatulloh¹, Lyvia Puji Wahyuni², Elya Sonyaraya Priasti³, Dwi Anggra Fardani⁴, Ainun Naim⁵

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: mohamadhermy.23473@mhs.unesa.ac.id¹, lyvia.23436@mhs.unesa.ac.id², elya.23448@mhs.unesa.ac.id³, dwi.23457@mhs.unesa.ac.id⁴, ainun.23459@mhs.unesa.ac.id⁵,

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang manajemen konflik dalam pemerintahan dengan fokus pada kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih sebagai strategi peningkatan kualitas kerja di lembaga kementerian. Konflik dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang tidak terelakkan akibat perbedaan kepentingan, komunikasi yang buruk, serta tumpang tindih kewenangan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis bagaimana Retreat Kabinet sebagai strategi manajemen konflik mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin, serta menyelaraskan visi di antara pejabat pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Retreat Kabinet yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 berperan signifikan dalam membentuk solidaritas kabinet, memperkuat nilai patriotisme, serta memperbaiki pola komunikasi lintas kementerian. Hasil temuan ini menegaskan bahwa manajemen konflik yang diterapkan secara strategis dalam bentuk forum kolektif mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja birokrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur manajemen konflik sektor publik dan manfaat praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif.

Kata Kunci: Manajemen Konflik, *Retreat* kabinet, Pemerintahan, Kualitas Kerja.

Abstract: This study discusses conflict management in government with a focus on the Retreat Kabinet Merah Putih (Red and White Cabinet Retreat) as a strategy to improve work quality within ministerial institutions. Conflict in government organizations is inevitable due to differences in interests, poor communication, and overlapping authorities. Using a descriptive qualitative approach and a literature review method, this research analyzes how the Cabinet Retreat, as a conflict management strategy, can strengthen coordination, improve discipline, and align the vision among government officials. The findings show that the Cabinet Retreat held by President Prabowo Subianto in October 2024 played a significant role in fostering cabinet solidarity, reinforcing patriotism, and improving cross-ministerial communication patterns. These findings affirm that strategically implemented conflict management through collective forums can have a positive impact on bureaucratic performance. This study provides theoretical contributions to the development of public sector conflict management literature and offers practical benefits for strengthening effective and adaptive governance.

Keywords: Conflict Management, Cabinet Retreat, Governance, Work Quality.

Introduction

Konflik merupakan suatu fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam interaksi antarmanusia. Untuk mengelola suatu konflik langkah utama yang dapat dilakukan yakni dengan memahami akar penyebabnya, hal ini dapat berupa perbedaan pendapat, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau konflik kepentingan (Tumengkol, 2016). Dengan dapat memahami sumber konflik maka sebab-sebab konflik dapat diuraikan dengan efektif. Setiap sebab konflik memiliki karakteristik dan dampak yang dapat berbeda tergantung bagaimana cara untuk mengelola konflik dengan lebih baik serta dapat mencari solusi yang dapat memuaskan dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan (Wiradhika, 2018). Menurut Batjo (2023), sebab-sebab konflik terdiri dari empat macam yaitu perbedaan nilai dan kepentingan, ketidaksepakatan dalam tujuan, komunikasi yang buruk, dan persaingan.

Manajemen konflik ialah pendekatan strategis dengan tujuan untuk mengelola dan menyelesaikan suatu konflik secara konstruktif, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Dengan menerapkan manajemen konflik yang efektif, konflik tidak hanya dapat diminimalisir, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ke arah perubahan positif. Menurut Aditya (2018), manajemen konflik pada pemerintahan berpengaruh bagi para individu dalam organisasi. Pengelolaan konflik yang dilakukan secara kolaboratif terbukti meningkatkan kepuasan kerja pegawai dan menjaga hubungan profesional antar perangkat organisasi.

Dalam konteks birokrasi pemerintahan, konflik dapat muncul dari perbedaan kepentingan, kewenangan yang tumpang tindih, hingga ketidakseimbangan komunikasi antara atasan dan bawahan. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik tersebut dapat menimbulkan disfungsi organisasi, menghambat pelayanan publik, dan merusak integritas institusi. Selain itu, manajemen konflik juga berperan dalam membangun soliditas internal dalam lingkup pemerintahan pusat. Contohnya terlihat dari *Retreat* Kabinet Merah Putih yang dilakukan pada Oktober 2024, yang menjadi forum strategis untuk menyamakan visi dan mengelola perbedaan pandangan antar anggota kabinet guna menghindari potensi konflik internal (Kementerian PANRB, 2024). Dalam jangka panjang, kemampuan pemerintah dalam mengelola konflik menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pentingnya pembahasan mengenai manajemen konflik dalam pemerintahan tidak hanya sebagai wacana teoritis, tetapi juga sebagai instrumen praktis untuk mewujudkan birokrasi yang harmonis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perbandingan struktur dan strategi pembekalan kabinet antara Kabinet Indonesia Hebat yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perbedaan dalam pendekatan pengelolaan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kabinet Indonesia Hebat terdiri dari 34 Kementerian menekankan pendekatan tentang pentingnya efektivitas program pemerintah dengan struktur yang ramping namun fungsional. Kabinet

ini dirancang secara efisien untuk menyederhanakan birokrasi dan memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintahan (Tempo.co, 2024). Sebaliknya, Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki 48 Kementerian yang merupakan kabinet terbesar sepanjang sejarah Indonesia pasca reformasi. Perluasan struktur kabinet ini menimbulkan sejumlah tantangan terutama dalam hal koordinasi, efisiensi, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Untuk mengatasi potensi konflik dalam struktur kabinet yang kompleks ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan mengadakan *retreat* kabinet selama tiga hari di Akademi Militer Magelang pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2024. Kegiatan pembekalan ini diikuti oleh seluruh jajaran kabinet menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga staf khusus dan bertujuan memperkuat kedisiplinan, kekompakan, serta menyelaraskan visi dan misi pemerintahan (KOMPAS.com, 2024; BBC Indonesia, 2024). Berbanding terbalik dengan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak ditemukan catatan bahwa Kabinet Indonesia Hebat mengadakan *retreat* serupa. Meskipun demikian, Presiden Jokowi dikenal rutin mengadakan rapat kerja kabinet dan pertemuan informal untuk memperkuat koordinasi serta menyusun prioritas kerja secara berkala (Antara News, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua pemerintahan tersebut memiliki tujuan yang sama dalam membangun strategi kabinet, pendekatan dan intensitas pembekalan yang dilakukan memiliki perbedaan yang signifikan.

Dalam konteks manajemen konflik dan tata kelola pemerintahan, penting untuk meninjau rekam jejak pelanggaran hukum yang melibatkan anggota kabinet sebagai indikator integritas dan efektivitas birokrasi. Setiap masa pemerintahan di Indonesia, selalu terjadi pelanggaran hukum yang bermacam-macam jenisnya. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tercatat sejumlah anggota kabinet yang terjerat kasus korupsi. Menurut laporan Kompas.com (2023), setidaknya enam menteri dan satu wakil menteri dari Kabinet Indonesia Hebat dan Kabinet Indonesia Maju telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus-kasus ini mencakup berbagai sektor, mulai dari hukum hingga pertanian, yang mencerminkan tantangan dalam menjaga integritas di berbagai lini pemerintahan. Sementara itu, Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024 menghadapi sorotan terkait pemilihan anggota kabinet. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa beberapa menteri dan wakil menteri yang dilantik memiliki rekam jejak kontroversial, termasuk pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi atau disebut-sebut dalam fakta persidangan terkait penerimaan uang korupsi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai komitmen pemerintahan terhadap pemberantasan korupsi dan integritas birokrasi (Antikorupsi.org, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua kabinet menghadapi tantangan dalam memastikan integritas dan akuntabilitas anggotanya. Manajemen konflik yang efektif dalam pemerintahan tidak hanya melibatkan koordinasi antar lembaga, tetapi juga penegakan etika dan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan

dalam memperkuat sistem seleksi dan pengawasan terhadap pejabat publik menjadi krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pemerintahan.

Patologi di dalam pemerintahan seringkali berangkat dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seperti halnya kasus korupsi di kementerian sosial, dan beberapa kebijakan yang diputuskan menteri tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat. Konflik dalam organisasi seringkali bersumber dari adanya keterbatasan sumber daya, perbedaan tujuan, ketergantungan tugas, komunikasi yang buruk antar divisi (Yulianti et al., 2025). Dengan memahami sumber konflik, pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari pendekatan reaktif yang hanya menangani gejala konflik, dan beralih pada upaya penyelesaian yang menyeluruh intinya permasalahan (Sholeh et al., 2024)

Oleh sebab itu upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh presiden Prabowo Subianto berkaca pada tingkat pelanggaran di berbagai jajaran pejabat, telah dilaksanakannya *Retreat* Kabinet merupakan langkah untuk memastikan kesiapan para menteri dan jajarannya serta bentuk konsolidasi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Di dalam penelitian (Camila, dan Rusliawan 2024) juga telah ditegaskan bahwa Prof. Hamdi Muluk menekankan adanya kegiatan pendidikan militer (*Retreat* Kabinet) dapat memperkuat loyalitas kepada negeri, loyalitas kebangsaan, dan disiplin yang selaras dengan nilai patriotisme. Sebab melalui aktivitas pendidikan militer dapat memperkuat kerjasama tim dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan para pejabat kementerian.

Meskipun konflik seringkali dipandang sebagai hal negatif, tidak sepenuhnya konflik ini memiliki dampak buruk bagi instansi maupun organisasi publik. Melalui langkah manajemen konflik disinilah berperan penting sebagai pemimpin dalam menjalankan stabilitas sosial yang terjadi. Dimana pemimpin ini dapat mengendalikan konflik dengan baik maka dapat menjadikan keuntungan bagi organisasi, akan tetapi berbanding terbalik apabila konflik tidak dapat di manajemen dengan baik memungkinkan menyebabkan kerugian kepentingan bersama di dalam organisasi (Anjani dan Kurniawati., 2024). Sehingga langkah dalam melaksanakan kegiatan *Retreat* Kabinet ini merupakan bentuk dalam memahami konflik sebagai salah satu aktivitas strategis manajemen konflik. Didalam buku manajemen konflik (Lawrence & Lawrence, 2019., Batjo et.al.2023) menekankan dalam memahami konflik ini terdapat lima hal utama yaitu : 1) Memperkuat hubungan, 2) Menghasilkan pemahaman yang lebih baik. 3) Mengembangkan perdamaian yang berkelanjutan, 4) Meningkatkan kinerja organisasi, 5) Mencegah dampak negatif.

Manajemen konflik berperan penting dalam menjaga stabilitas koordinasi organisasi salah satunya melalui komunikasi yang efektif (Anjani dan Kurniawan., 2024). Sehingga sangat penting bagi setiap para anggota organisasi dapat meningkatkan kemampuannya baik berkomunikasi dan koordinasi serta kemampuan manajemen permasalahan yang terjadi didalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat mengenai pentingnya penerapan manajemen konflik pada organisasi atau instansi publik

sebagai bentuk peningkatan kualitas kerja anggota berdasarkan penelitian dan jurnal-jurnal terdahulu. Selain itu juga melalui penulisan ini memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai dampak penerapan manajemen konflik pada organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana manajemen konflik dalam meningkatkan kualitas kerja di lembaga kementerian pada kegiatan *retreat* Kabinet Merah Putih.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen konflik dalam meningkatkan kualitas kerja di lembaga kementerian pada kegiatan *retreat* Kabinet Merah Putih

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai manajemen konflik dalam konteks organisasi publik khususnya pada bidang pemerintahan. Dengan mengkaji secara komprehensif praktik *retreat* kabinet sebagai salah satu upaya implementasi manajemen konflik secara strategis. Selain hal tersebut manfaat teoritis penelitian ini memberikan kontribusi memahami konsep manajemen konflik akan pentingnya kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi dalam menjaga potensi konflik internal lembaga pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan internal khususnya yang berkaitan dengan sistem manajemen konflik.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini berdampak secara tidak langsung melalui peningkatan pelayanan publik.
- c. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang relevan untuk menambah wawasan mengenai dinamika organisasi pemerintahan, khususnya dalam aspek pengelolaan konflik.
- d. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan sarana aktualisasi dan pengembangan kapasitas intelektual dalam bidang ilmu administrasi negara.

Method

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif sebagai analisis kuat dalam fenomena sosial yang mendalam dengan pendekatan data sekunder literatur ilmiah dan sumber akurat lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kepustakaan membatasi kegiatan penelitian hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (Zed, 2014). Penelitian kepustakaan dilakukan

dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan (Mendes et al., 2020). Penelitian ini dengan membaca, menelaah, dan menganalisis dari berbagai literatur seperti hasil penelitian, buku, jurnal dan analisis penelitian. Metode kepastakaan (*library research*) dalam penelitian ini dengan komprehensif yang relevan dengan manajemen konflik dan dampak atau peningkatan kualitas kerja di lembaga kementerian.

2.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

2.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Mirzaqon dan Purwoko (2017) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kepastakaan bisa dengan dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Teknik pengumpulan data adalah metode untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan dan langkah strategis dengan tujuan utamanya, yakni mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dengan membaca buku atau sumber penelitian dalam kepastakaan untuk menghimpun informasi dan data.

Instrumen penelitian menurut Mirshad (2014), adanya dua instrumen digunakan dalam pengumpulan data yakni pengumpulan data dengan verbal simbolik dengan mengumpulkan naskah yang belum dianalisis dan kartu data sebagai mencatat hasil data yang didapatkan untuk lebih mudah klarifikasi data. Dokumentasi diperlukan untuk menghimpun dan mengklasifikasi data yang sesuai dan dihubungkan dengan teori, konsep, dan pembandingan yang dapat ditarik kesimpulan. Triangulasi dilakukan untuk pengumpulan data sebagai penggabungan yang ada yang bertujuan menguji kredibilitas dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan menggali keabsahan dan kebenaran data dari berbagai sumber data yang ada.

2.2.2 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mencari dan menyusun data dengan sistematis dengan sesuai urutan, diorganisasikannya pada suatu pola, melakukan sintesa, penjabaran ke dalam unit-unit, mengkategorikan data dan membuat kesimpulan. Mirzaqon dan Purwoko (2017) mengemukakan teknik analisis data dengan metode penelitian kepastakaan dapat menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi adalah fokus dengan konten aktual dan fitur internal media dengan mengkaji dan menganalisis seperti perilaku

manusia secara tidak langsung dengan komunikasi seperti pada buku, esai, artikel, berita, dan jenis komunikasi lainnya.

Analisis isi (*content analysis*) untuk tujuan memahami makna simbolik, dinamika konflik, narasi, evaluasi dan media komunikasi organisasi pada *retreat*. Dengan kajian kualitatif yang konseptual dengan pengumpulan data dari referensi dengan mudah untuk membentuk konsep yang akan menjadikan isi dengan komprehensif. Analisis isi (*content analysis*) dengan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah dari berbagai jenis konten yang relevan dan sesuai terhadap tujuan penelitian tersebut. Analisis isi sebagai himpunan dan analisis data validitas dan keabsahan yang terjamin yang dapat bersifat empiris maupun teoritis. Tahapan atau alur dalam analisis tersebut adalah :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pencatatan atau rangkuman data sesuai permasalahan dan tujuan penelitian diungkapkan secara deskripsi dan konstruksinya disusun dalam refleksi. Tahap ini dengan pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data dengan tujuan mendapatkan data temuan penelitian. Penyederhanaan data yang relevan dengan khusus pada dinamika manajemen konflik dan strateginya terhadap kinerja organisasi.

b. Display Data

Data setelah direduksi akan didisplay untuk mendapatkan pemahaman dan interpretasi dari data yang disajikan sebagai konteks yang jelas dan mendukung data yang dianalisis dengan mengkategorikan analisis dan aspek permasalahan penelitian guna menentukan tahap dan langkah selanjutnya. Data dalam bentuk narasi yang memuat kutipan dari sumber yang ada akan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap manajemen konflik dan penyelesaiannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah tahap reduksi dan display, proses konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang dianalisis pada penelitian. Langkah terakhir ini dengan diperoleh keabsahan data hasil dari penelitian. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian untuk menarik kesimpulan yang valid. Data dari hasil penelitian dapat diverifikasi kembali untuk mendapatkan konklusi atau hasil kesimpulan penelitian dari data yang maksimal. Penarikan kesimpulan dapat merumuskan jawaban dari pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Results and Discussion

3.1.1 Data konflik dan strategi penyelesaian

Konflik dalam lembaga kementerian merupakan fenomena yang kompleks dan tidak terelakkan dalam struktur organisasi publik. Konflik dapat bersumber dari tumpang tindih kewenangan, perbedaan visi antar pemimpin lembaga, hingga komunikasi yang buruk antar unit kerja. Menurut (Yulianti et al.,2025), konflik kerap dipicu oleh keterbatasan sumber daya, perbedaan tujuan, dan ketergantungan tugas antar bagian organisasi. Dalam konteks Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024 dengan jumlah kementerian mencapai 48 yang terbesar sepanjang sejarah pasca reformasi, memiliki potensi konflik struktural dan horizontal yang sangat tinggi. Untuk merespon hal ini, Presiden Prabowo menyelenggarakan *Retreat* Kabinet selama tiga hari pada 24-27 Oktober 2024 di Akademi Militer Magelang. Kegiatan ini merupakan strategi pengelolaan konflik yang bersifat pencegahan sekaligus transformasional karena tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga membentuk karakter kolektif pejabat negara. Strategi ini sejalan dengan gagasan (batjo, Rachmad, dan Haryati,2023), yang menekankan pentingnya penguatan hubungan dan pemahaman untuk menyelesaikan konflik. Penanganan konflik yang menysasar akar masalah jalur lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya fokus pada gejala permukaan (Sholeh et al.,2024). *Retreat* Kabinet dijadikan sebagai forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat loyalitas kebangsaan, dan menumbuhkan semangat kolektif sebagai satu kesatuan pemerintahan (Rusliawan & Camila,2024).

3.1.2 Perubahan atau perbedaan kualitas kerja

Setelah pelaksanaan *Retreat* Kabinet, beberapa perubahan positif dalam kualitas kerja pejabat kementerian mulai terlihat. Koordinasi lintas kementerian menjadi lebih solid, terlihat dari percepatan implementasi program prioritas seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan digitalisasi layanan publik. Kemampuan koordinasi yang meningkat ini mencerminkan efektifitas komunikasi yang sebelumnya menjadi kendala, sebagaimana disebutkan (Anjani dan Kurniawati,2024), bahwa komunikasi efektif merupakan elemen utama dalam manajemen konflik. Kegiatan *retreat* yang mengadopsi pendekatan pendidikan militer terbukti memperkuat etos kerja, nasionalisme, dan disiplin sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Hamdi Muluk dalam jurnal (Rusliawan dan Camila,2024). *Retreat* ini juga membantu mengurangi konflik antar pejabat dan mempererat solidaritas kerja. Dalam jangka pendek *retreat* memberikan dampak pada stabilitas internal organisasi dan dalam jangka panjang dapat memperkuat daya tahan birokrasi terhadap tekanan politik, kepentingan sosial, maupun konflik antar lembaga yang muncul dari gesekan ideologi dalam kabinet yang bervariasi.

3.1.3 Analisis hubungan strategi manajemen konflik dengan peningkatan kerja

Strategi manajemen konflik melalui *retreat* kabinet merupakan bentuk nyata dari pendekatan transformasional dalam mengelola organisasi publik. *Retreat* tidak hanya berperan sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai media penanaman nilai, pembentukan karakter kolektif, dan harmonisasi visi kebangsaan. Kegiatan ini juga mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan kolaboratif, bukan kompetitif, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang sinergis antar lembaga. Gaya manajemen konflik yang kolaboratif terbukti meningkatkan kepuasan kerja pegawai dan memperkuat hubungan profesional, terutama dalam birokrasi pemerintahan (Aditya,2018). Adanya *retreat* ini, konflik antar kementerian tidak dibiarkan berkembang menjadi benturan terbuka, tetapi diubah menjadi titik temu untuk membangun kerja sama strategis demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

3.1.4 Hasil temuan perbandingan dengan studi terdahulu dan implikasi teoritis dan praktis

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Retreat* Kabinet Merah Putih merupakan bentuk implementasi manajemen konflik yang bersifat proaktif dan berorientasi pada perubahan menyeluruh. *Retreat* ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyamaan visi antar kementerian, tetapi juga sebagai media penanaman nilai kebangsaan, disiplin,, dan loyalitas kolektif. Temuan ini diperkuat hasil studi (Aditya,2018) yang menyoroti pentingnya gaya manajemen konflik kolaboratif dalam meningkatkan kinerja birokrasi, serta (Anjani dan Kurniawati,2024) yang menekankan pentingnya komunikasi efektif dalam membangun sinergi antar organisasi. Selain itu penelitian ini juga memperluas temuan (Yulianti et al.,2025), dengan menunjukkan bahwa konflik struktural dalam birokrasi yang kompleks dapat dicegah melalui pendekatan yang menyentuh aspek psikologis dan ideologis pegawai.

Jika dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya yang digunakan oleh Kabinet Indonesia Hebat dan Indonesia Maju, yang lebih bersifat teknis dan administratif, pendekatan *retreat* kabinet menawarkan dimensi baru dalam pengelolaan konflik. Pendekatan terdahulu mengandalkan koordinasi sektoral dan rapat formal, sementara *retreat* menambah unsur pembentukan karakter kebersamaan dan penggabungan nilai nasionalisme sebagai pondasi kerja. Hal ini selaras dengan pandangan (Rusliawan dan Camila,2024) yang menyebutkan bahwa kegiatan berbasis pendidikan militer mampu memperkuat kedisiplinan dan integritas birokrasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana manajemen konflik dalam organisasi publik khususnya dengan menyoroti pentingnya pembaruan nilai sebagai bagian dari stabilisasi kelembagaan. Sementara secara praktis, *retreat* dapat direkomendasikan sebagai langkah awal pemerintahan untuk memperkuat kesatuan visi dan menghindari konflik internal sejak dini.

Conclusions

Simpulan

Manajemen konflik dalam pemerintahan yang khususnya di lingkungan Kabinet Merah Putih menjadi aspek yang krusial dalam menjaga efektivitas dan stabilitas kerja di lembaga kementerian. *Retreat* Kabinet yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto terbukti menjadi strategi preventif dan transformatif dalam mengelola potensi konflik yang muncul akibat kompleksitas struktur kabinet yang luas. Melalui pendekatan ini, konflik tidak hanya diredam tetapi juga harus diubah menjadi momentum untuk memperkuat loyalitas pemerintahan, serta menyelaraskan visi dan misi pemerintah.

Retreat Kabinet ini berperan sebagai sarana komunikasi yang strategis, konsolidasi internal, dan penguatan kapasitas kepemimpinan yang berdampak langsung pada peningkatan koordinasi lintas kementerian dan efektivitas pelaksanaan program prioritas. Hasil positif setelah dilakukannya *retreat* menunjukkan bahwa dengan penerapan manajemen konflik yang dikelola dengan tepat dan baik, kualitas kerja kementerian dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini menegaskan bahwa konflik yang dikelola dengan baik bukan hanya dapat meminimalisir dampak tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen pengembangan organisasi yang konstruktif dan berorientasi pada hasil.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

Perlunya tindakan praktis dalam tata kelola melalui pemerintah khususnya lembaga kementerian. Kegiatan *retreat* sebaiknya difokuskan juga pada pembangunan budaya kerja yang kolaboratif, peningkatan komunikasi interpersonal, dan penguatan identitas kolektif antarpejabat negara.

Peningkatan kapasitas internal organisasi dengan mulai membentuk unit khusus yang terlatih dalam manajemen konflik serta menyusun protokol resolusi konflik yang dapat digunakan dalam situasi kritis. Hal ini akan memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika internal maupun eksternal, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara lebih efektif.

Acknowledgement

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah penelitian ini yang berjudul "Analisis Manajemen Konflik Dalam Peningkatan Kualitas Kerja Pada Lembaga Kementerian Melalui Kegiatan *Retreat* Kabinet Merah Putih", dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik serta untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi di lingkungan perguruan tinggi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan kuantitatif guna memperoleh data yang objektif dan dapat dianalisis secara statistik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat, perlindungan, rahmat dan belas kasih-Nya yang menjadi sumber kekuatan penulis.
2. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama penyusunan makalah ini.

References

- Aditya, Saka (2018). *Pengaruh gaya manajemen konflik terhadap kepuasan kerja di pemerintahan Kabupaten Boyolali* (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alfi Anjani, D., & Dewi Kurniawati. (2024). Pentingnya Manajemen Konflik Dalam Organisasi. *Nivedana : Jurnal Komunikasi Dan Bahasa*, 5(1), 23-31.
- Antara News. (2024). *Jokowi sering kumpulkan menteri untuk evaluasi kinerja kabinet*. Diakses melalui <https://www.antaranews.com>.
- Antikorupsi.org. (2024, 21 Oktober). *Kabinet Prabowo-Gibran tak cerminkan keberpihakan pemberantasan korupsi*. Diakses melalui <https://www.antikorupsi.org/id/kabinet-prabowo-gibran-tak-cerminkan-keberpihakan-pemberantasan-korupsi>.
- Batjo, S. N., Rachmat, E., & Haryati, S. (2023). *Manajemen konflik*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- BBC Indonesia. (2024, 28 Oktober). *Retreat kabinet Merah Putih: 'Perlu untuk membentuk kedisiplinan dan kekompakan'*. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3dev1r0vll0>.
- Kementerian PANRB. (2024). *Retreat Kabinet Merah Putih: Harapan Baru untuk Indonesia*. Diakses melalui <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/retreat-kabinet-merah-putih-berakhir-harapan-baru-untuk-indonesia>.
- Kompas.com. (2024, 28 Oktober). *Pesan Prabowo pada Kabinet Merah Putih selama 3 Hari Retreat di Akmil*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/10163341/pesan-prabowo-pada-kabinet-merah-putih-selama-3-hari-retret-di-akmil>.
- Kompas.com. (2023, 10 November). *Daftar anggota kabinet Jokowi yang terjerat korupsi: 6 menteri dan 1 wakil menteri*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/10/09375961/daftar-anggota-kabinet-jokowi-yang-terjerat-korupsi-6-menteri-dan-1-wakil>.
- Rusliawan, S., & Camila, L. A. (2024). Dinamika Psikologis dalam Pembentukan Kabinet Merah Putih: Analisis dari Lembah Tidar. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8670-8675.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.
- Sholeh, M. I., Mohamed, M. R. A. A., Mintarsih, M., binti Ab Rahman, S. F., & Asrop, S. I. (2024). Efektivitas Penggunaan E-Learning dalam Pembelajaran Akuntansi di SMK Tulungagung. *Hatta: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 2(2), 70-82.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.334
- Tempo.co. (2024). *Apa saja kementerian yang dipecah sehingga kabinet Merah Putih gemuk?*. Diakses melalui <https://www.tempo.co>.
- Tumengkol, Selvie M. 2016. "Dinamika Konflik Dalam Organisasi." e-journal "Acta Diurna" III(2): 1–12.
- Wiradhika, Nanda. 2018. "Konflik Sara Dalam Novel Jalan Lain Menuju Tulehu Karangan Zen R.S. : Sebuah Tinjauan Sosiologi Sastra." AKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2(1): 17–28.